KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENKEU CORPU TALK

MENJAGA KELANGSUNGAN EKONOMI INDONESIA DARI PANDEMI COVID-19

FEBRIO KACARIBU
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,
KEMENTERIAN KEUANGAN

Jakarta, 20 Juli 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL, COVID-19 & DAMPAK PADA INDONESIA

KASUS COVID-19 MASIH TERUS MENINGKAT SECARA SIGNIFIKAN DI DUNIA

Total Kasus & Kematian Kumulatif

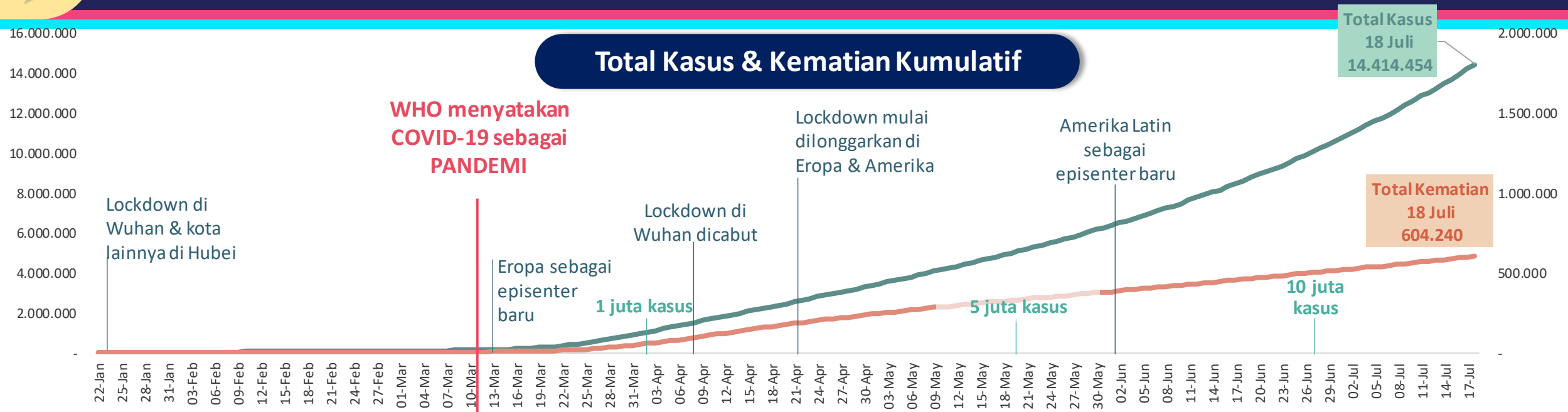

Tambahan Kasus Harian

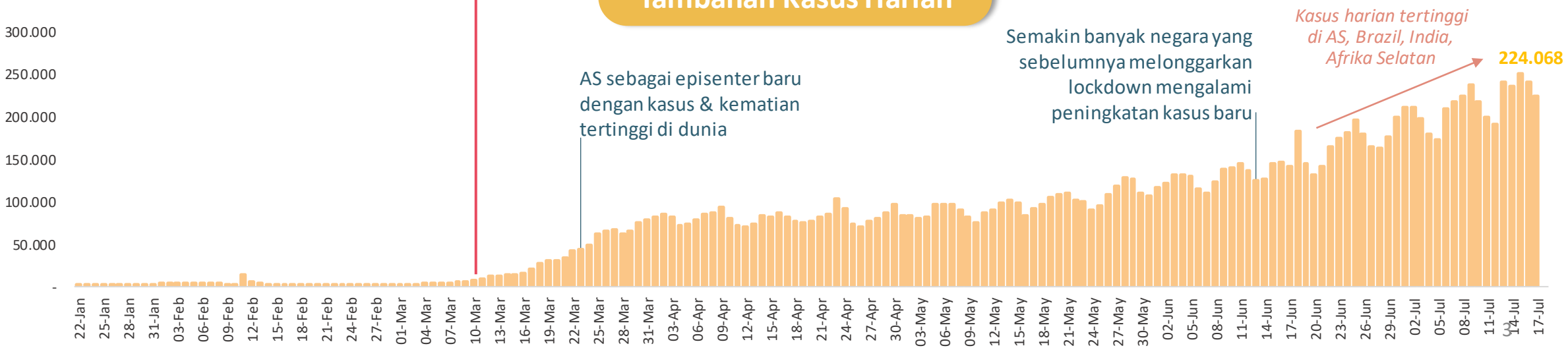

Sumber: worldmeters.info, 12 Juli

KASUS COVID-19 DI INDONESIA JUGA MASIH MENINGKAT

Presiden menginstruksikan agar penyebaran Covid-19 khususnya di 8 wilayah dikendalikan

Share PDB 5,1%
SUMUT
2.937 kasus
146kematian
88 kasus baru (rata-rata 7 hari)

Share PDB 1,1%
KALSEL
4.938 kasus
246 kematian
113 kasus baru

Share PDB 3,2%
SULSEL
8.039 kasus
279 kematian
152 kasus baru

Share PDB 1,2%
PAPUA
2.601 kasus
27 kematian
48 kasus baru

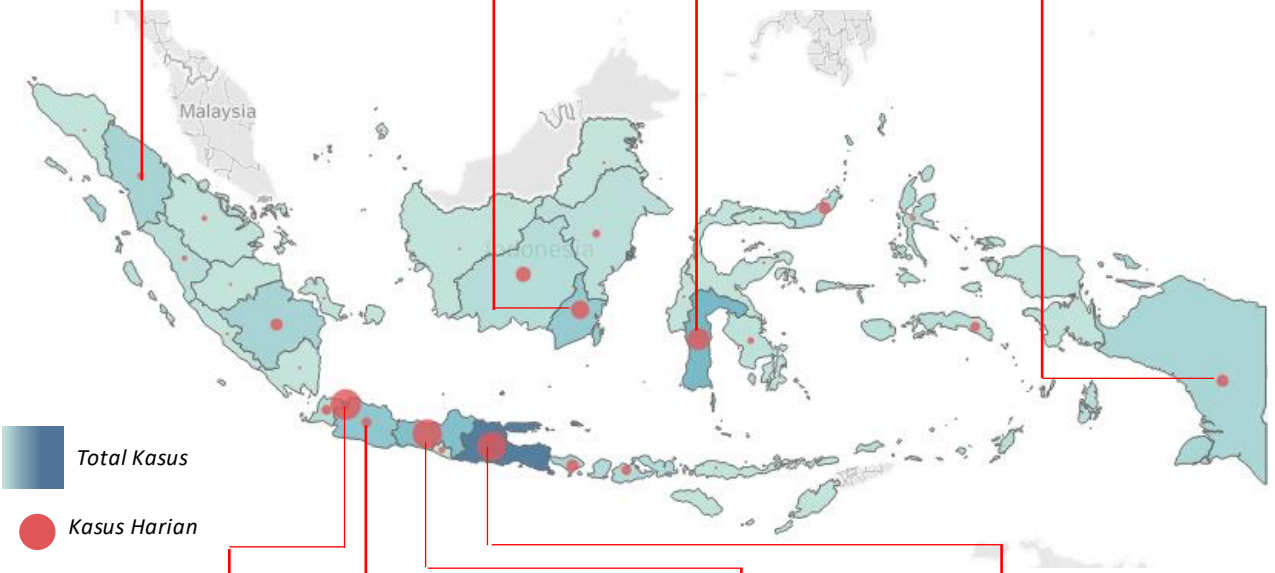

Share PDB 18,0%
JAKARTA
16.538 kasus
736 kematian
289 kasus baru

Share PDB 13,4%
JABAR
5.488 kasus
190 kematian
59 kasus baru

Share PDB 8,6%
JATENG
6.932 kasus
323 kematian
208 kasus baru

Share PDB 14,9%
JAWA TIMUR
18.308 kasus
1.401 kematian
236 kasus baru

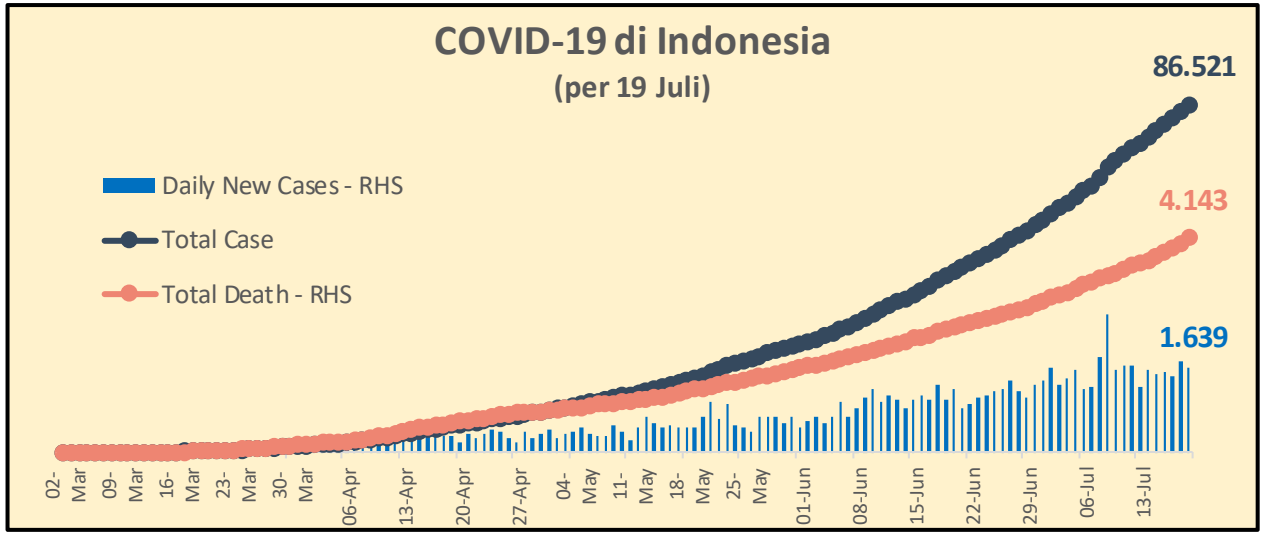

Beberapa Provinsi Lain dengan Kasus Covid-19 di atas 1000

Provinsi	Total Kasus	Total Kematian	Kasus baru (rata-rata 7 hari)
Sumatera Selatan	3012	139	51
Bali	2937	146	79
Sulawesi Utara	2745	40	34
Banten	2601	27	12
NTB	1898	111	25
Kalimantan Tengah	1725	94	29
Maluku Utara	1674	84	20

COVID-19 SECARA DRAMATIS MENGUBAH PANDANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL: DARI YANG SEBELUMNYA OPTIMIS MENJADI RESESI

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global oleh World Bank (%, yoy)

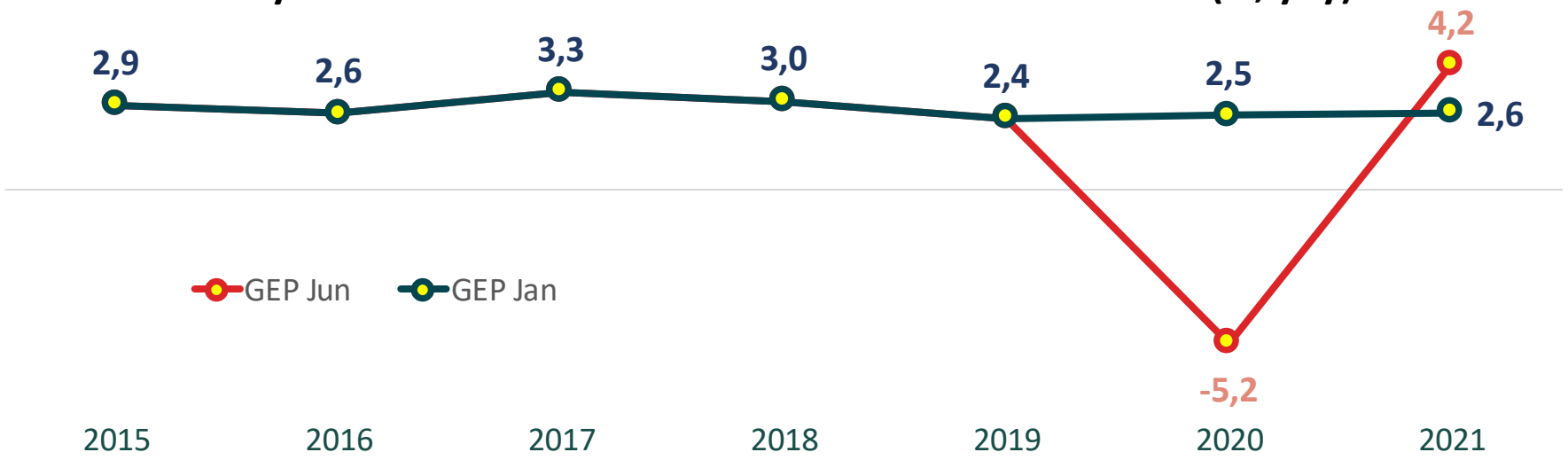

Proyeksi dari berbagai institusi lain (%, yoy)

IMF

OUTLOOK	2020	2021
JANUARI	3,3	3,4
APRIL	-3,0	5,8
JUNI	-4,9	5,4

OECD

OUTLOOK	2020	2021
MARET	2,4	3,3
JUNI	-7,6* s.d. -6,0	2.8* s.d. 5,2

- Proyeksi ekonomi global di awal tahun 2020 masih menunjukkan ekspektasi yang positif
- COVID-19 membalikkan ekspektasi optimis menjadi resesi
- Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 diperkirakan terkontraksi tajam
- Perbedaan angka proyeksi dari berbagai institusi menunjukkan adanya ketidakpastian yang tinggi

**) OECD mengasumsikan terjadi second wave pada worst case scenario*

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL 2020 TERKOREKSI TAJAM

Berdasarkan *Bloomberg Forecast,* dalam survei bulan Juli 2020 ekspektasi kontraksi q2-2020 lebih dalam dibanding survei Juni 2020

Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju (%, yoy)

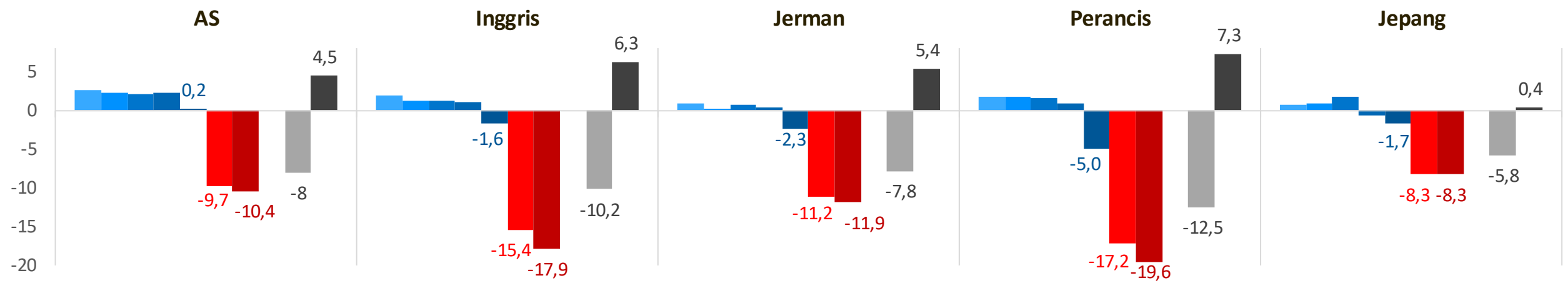

Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang & ASEAN (%, yoy)

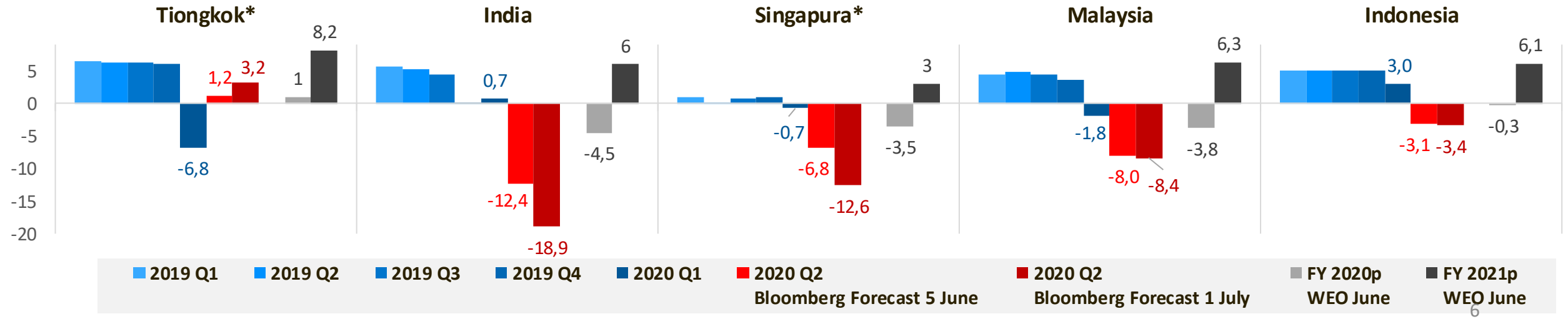

*) *Pert Tiongkok & Singapura Q2-2020 merupakan realisasi*

SEKTOR KEUANGAN DAN SEKTOR RIIL TERDAMPAK PARAH AKIBAT PANDEMI

INDIKASI PEMULIHAN SUDAH MULAI NAMPAK

Volatility Index (VIX)

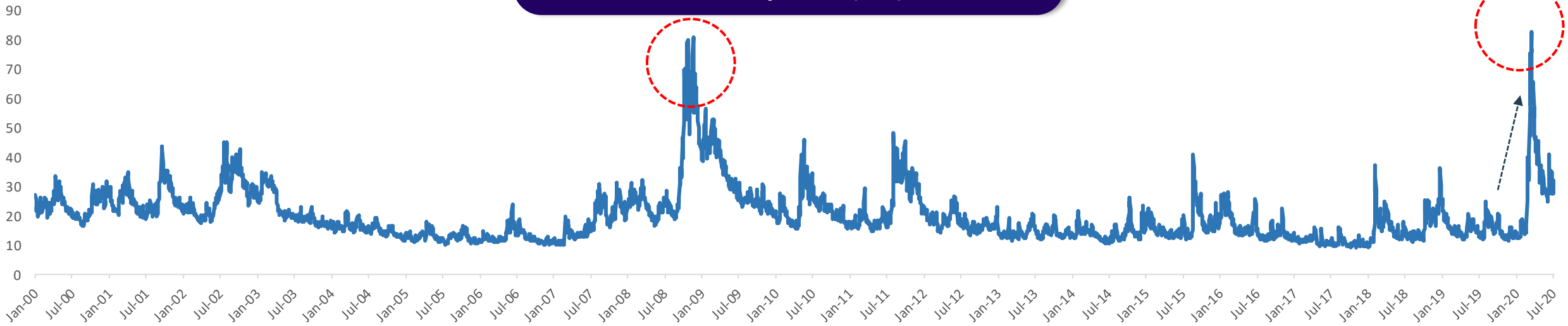

PMI Manufacture - Global

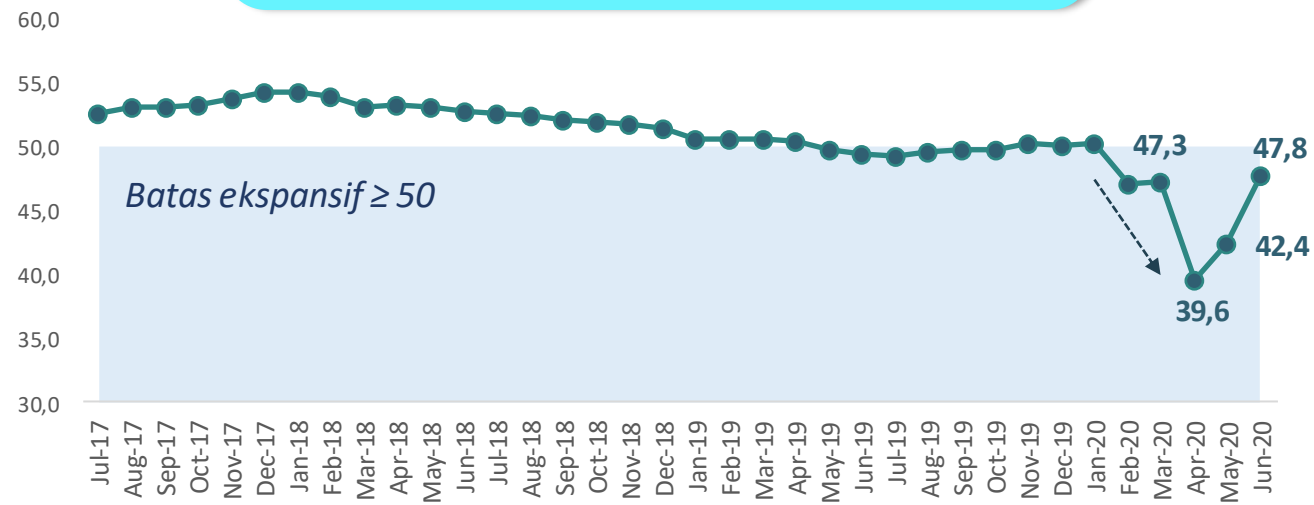

Indeks Harga Komoditas (2012 = 100)

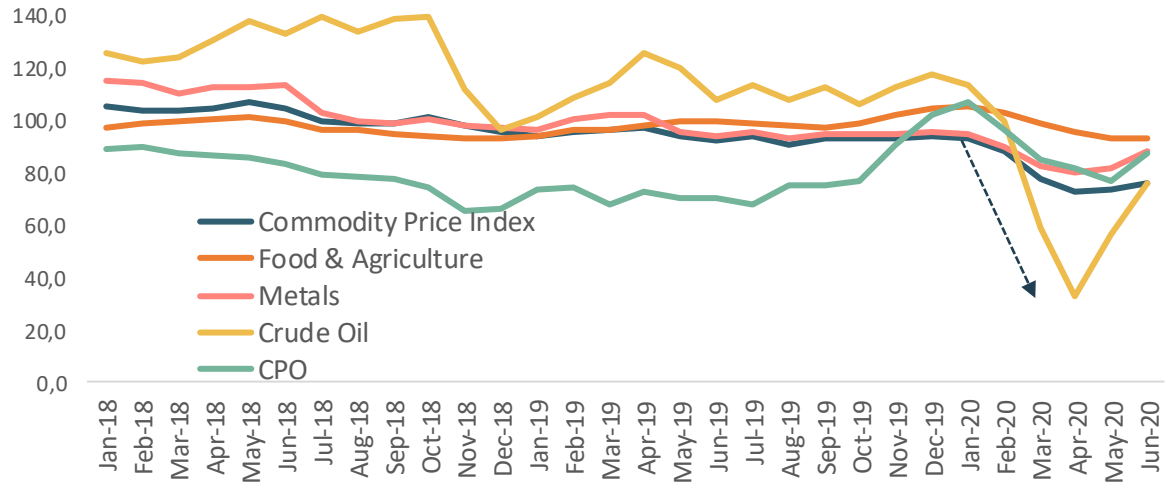

Sumber: Bloomberg

COVID-19 MEMBERI SYOK PADA EKONOMI INDONESIA DARI SISI *(DEMAND)* PERMINTAAN DAN PRODUKSI *(SUPPLY)*

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2020 **2,97%**

DEMAND

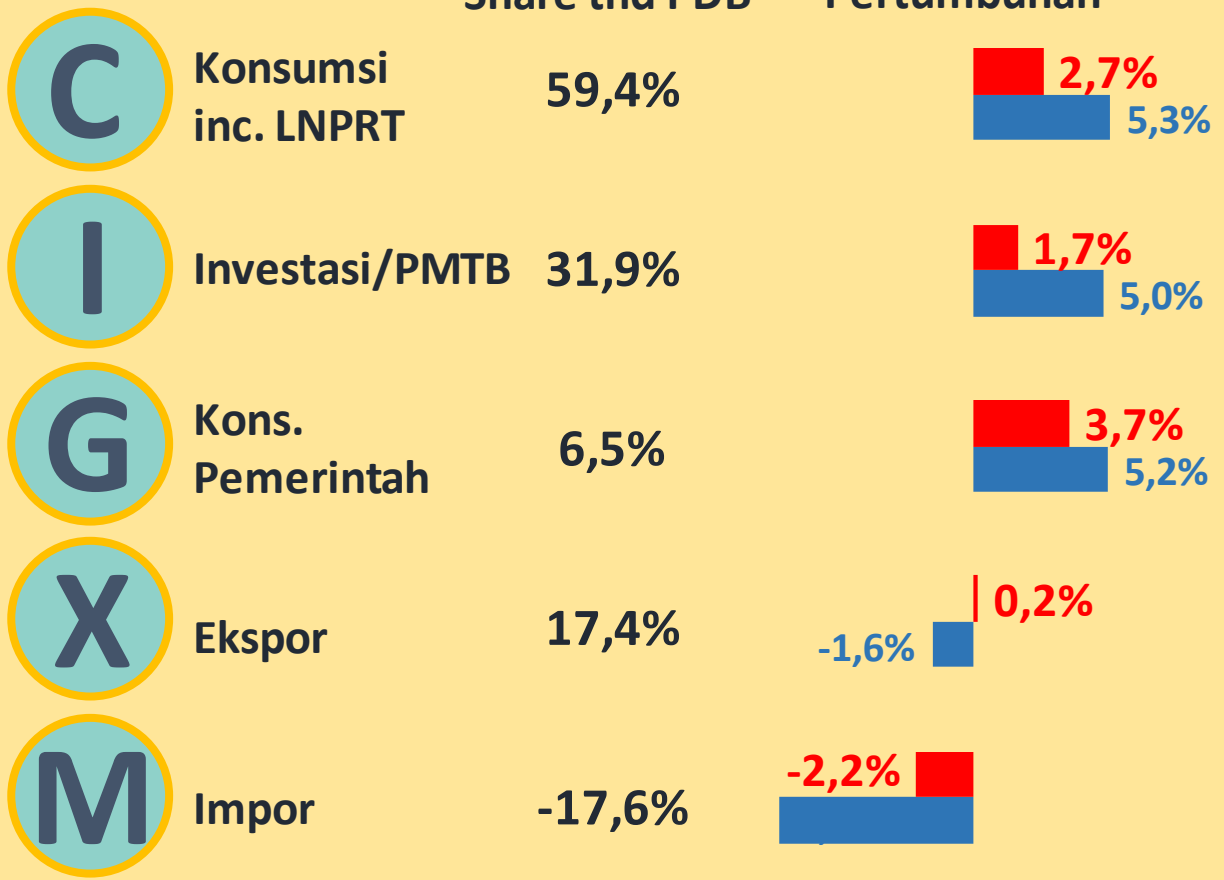

SUPPLY

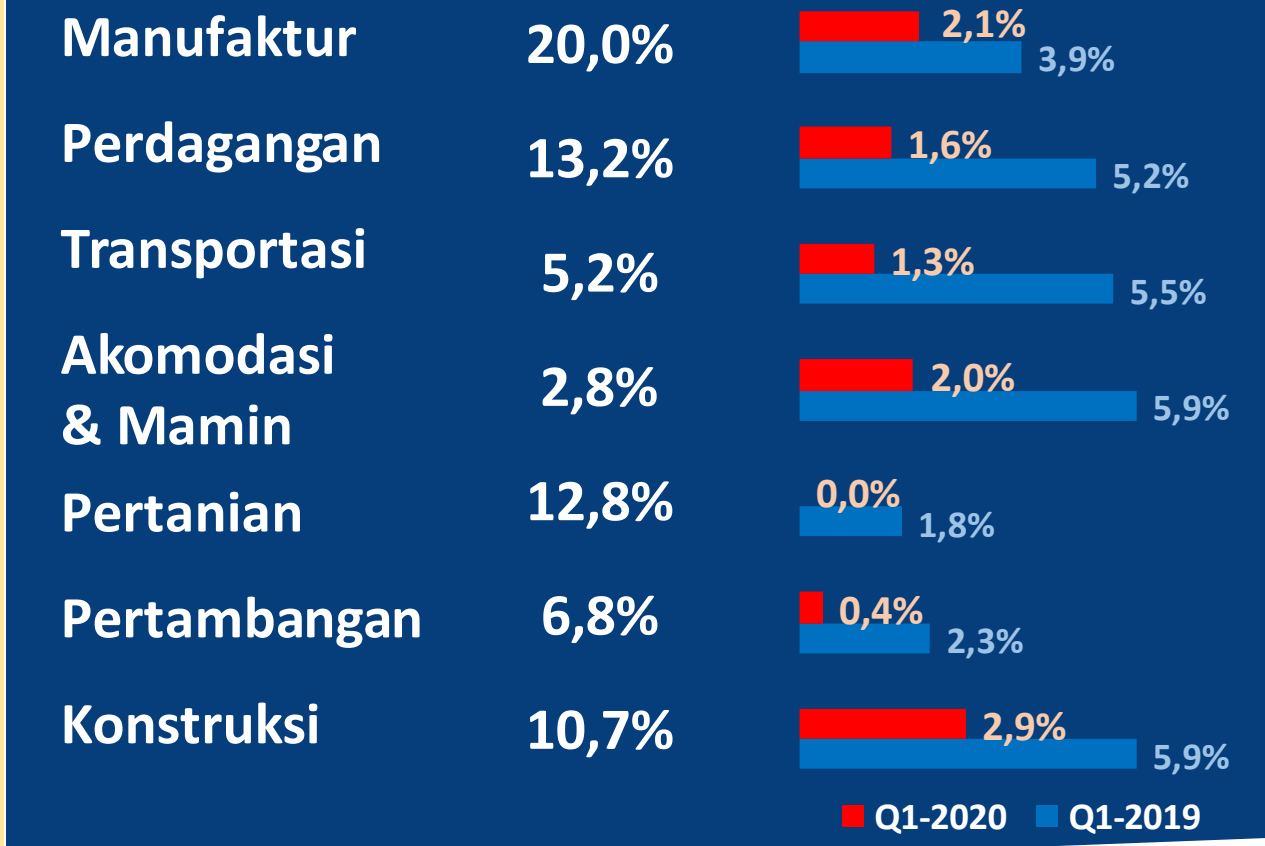

Sumber: BPS, diolah

MESKI ADA TEKANAN, STABILITAS EKONOMI TETAP TERJAGA: INFLASI TERKENDALI & SENTIMEN INVESTOR MEMBAIK

Inflasi (IHK) masih mencatat tren menurun sejak Maret dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB

Stabilitas sektor keuangan telah membaik didukung berbagai kebijakan untuk penanganan COVID-19 dan mitigasi ekonomi

Perkembangan Inflasi dan Komponennya

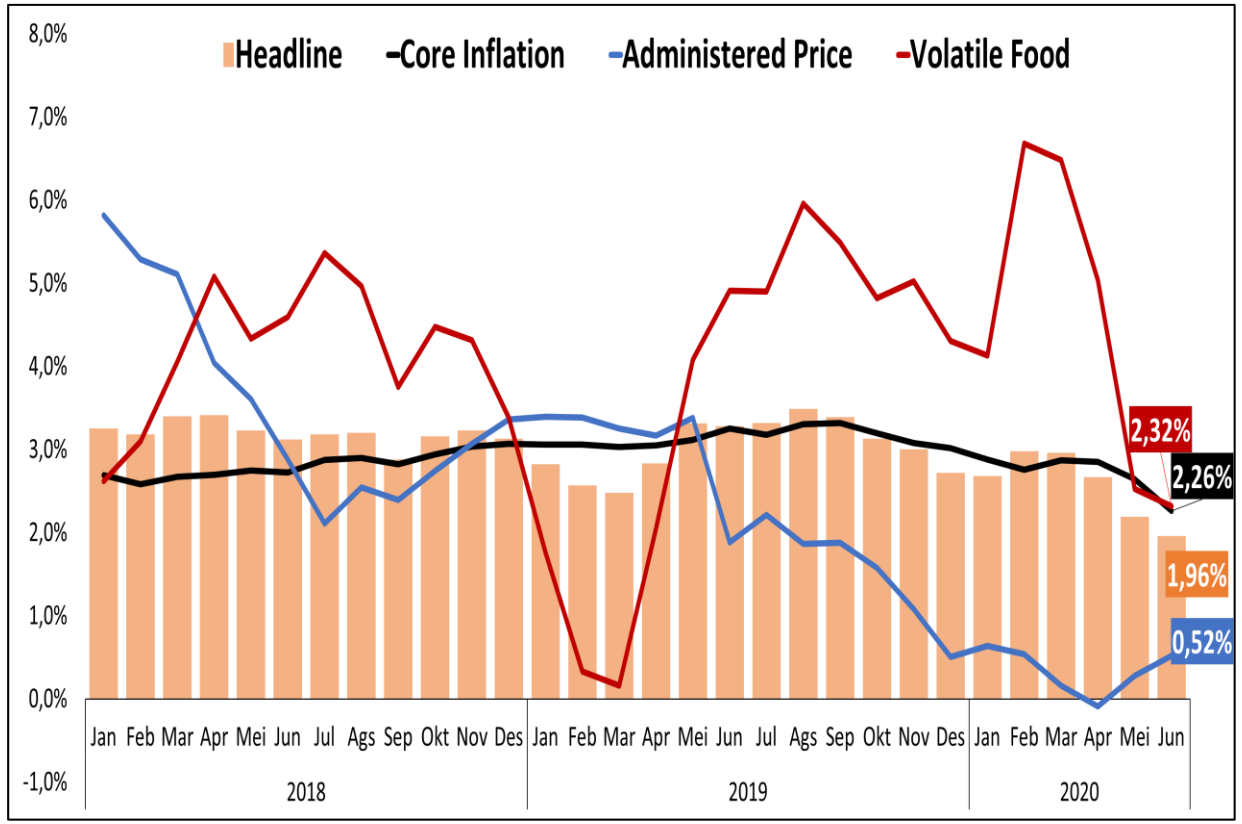

Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah per US$

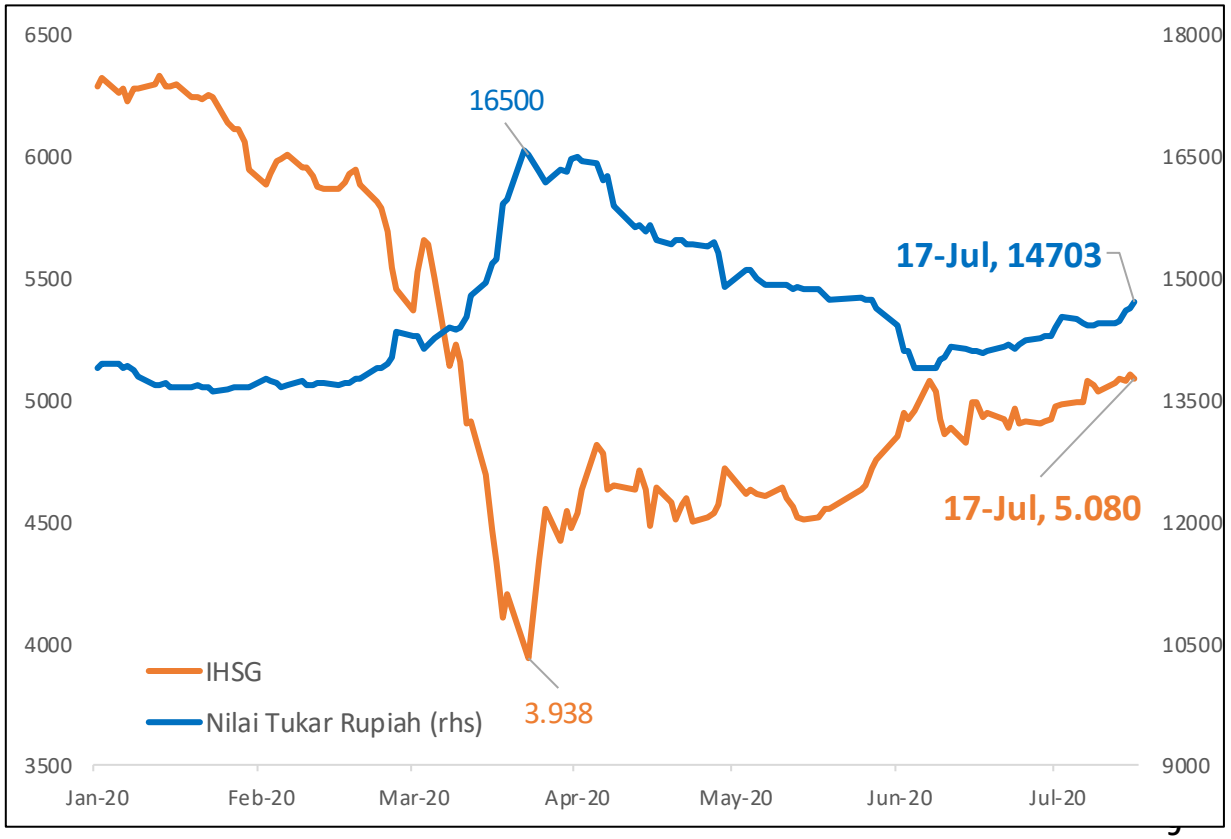

Sumber: BPS, diolah

WABAH COVID-19 BERPENGARUH PADA PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI & KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pertumbuhan ekonomi ↓ → **Pemutusan hubungan kerja & pengangguran** ↑ → **Masyarakat Miskin** ↑

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020

Sebelum COVID-19	5,3% (APBN 2020)	
Sesudah COVID-19	-0,4% Skenario Sangat Berat	1,0% Skenario Berat

Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan

(juta orang)

Kemiskinan	+5,71	+3,02
Pengangguran	+5,23 Skenario Sangat Berat	+4,03 Skenario Berat

Sumber: Kemenkeu RI

- Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus **dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat** – melalui kebijakan *extraordinary*
- Dengan berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya **menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju skenario sangat berat**

PROYEKSI BERBAGAI INSTITUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2020-2021

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, update Juni (dalam %, yoy)

	Kemenkeu	IMF	World Bank	OECD	ADB	Bloomberg (Median)
2020	-0,4 s.d 1,0	-0,3	0,0	-3,9 s.d -2,8	-1,0	0,5
2021	4,5 s.d 5,5	6,1	4,8	2,6 s.d. 5,2	5,3	5,5

Sumber: WB Global Economic Prospect 2020, OECD Economic Outlook 2020, Asian Development Outlook 2020, World Economic Outlook IMF, Bloomberg (diolah)

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LANGKAH KEBIJAKAN MENGATASI PANDEMI COVID-19 & PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

LANGKAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI

FISKAL

Realokasi Anggaran & Refocusing Program

- Refocusing APBN & APBD untuk menangani COVID-19

Stimulus #1 (Feb)

Rp8,5 triliun

- Akselerasi belanja, terutama belanja modal dan perlindungan sosial (*social safety net*)
- Stimulus untuk sektor spesifik a.l. pariwisata

Stimulus #2 (Mar)

Rp22,5 triliun

Insentif Pajak, kemudahan ekspor impor, stimulus untuk sektor keuangan

Stimulus #3 (Mar)

Rp405,9 triliun

Penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional & menjaga stabilitas keuangan (melalui **Perppu No.1/2020)**

Diperluas →

Biaya Penanganan COVID-19

Rp695,2 triliun

(4,2% thd PDB)

- Bidang Kesehatan Rp87,55 triliun
- Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN Rp607,65 triliun

Bauran kebijakan moneter dan keuangan untuk mendukung kesinambungan perekonomian

MONETER

- Menurunkan suku bunga BI 7DRR
- Meningkatkan intensitas *triple intervention*
- Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM)
- Memperluas jenis *underlying transaction*
- Menyediakan uang higienis, dll.

KEUANGAN

- Relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM
- Restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM

LANGKAH CEPAT DAN LUAR BIASA PENANGANAN COVID-19 & DAMPAKNYA MELALUI PENERBITAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020

LATAR BELAKANG

- Pandemi COVID-19 memicu **krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi**
- Pandemi COVID-19-19 menciptakan **kondisi kegentingan yang memaksa**
- Pemerintah perlu mengambil **langkah cepat & luar biasa (*extraordinary*)**

QUICK RESPONSES

Penerbitan

PERPPU No. 1/2020

sebagai payung hukum untuk mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Pandemi COVID-19.

Saat ini, PERPPU tersebut telah disahkan menjadi

UU No. 2/2020

BEBERAPA KEBIJAKAN DALAM PERPPU

Kebijakan Keuangan Negara

- Penyesuaian **batasan defisit APBN**
- Penggunaan **sumber pendanaan alternatif** anggaran
- Penyesuaian ***mandatory spending***, pergeseran dan ***refocusing*** anggaran pusat dan daerah
- Program penerbitan **SBN** dan pinjaman dalam rangka **pembiayaan tambahan defisit**
- **Insentif** dan fasilitas perpajakan
- Pelaksanaan **Program Pemulihan Ekonomi Nasional** untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Kebijakan Sektor Keuangan

- **Perluasan kewenangan KSSK** dan ruang lingkup rapat KSSK
- Penguatan kewenangan BI, termasuk **membeli SBN jangka panjang di pasar perdana**
- **Penguatan kewenangan OJK dan LPS** untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan
- **Penguatan kewenangan Pemerintah** dalam menangani **permasalahan perbankan** dan **stabilitas sistem keuangan**

PROGRAM KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF & TERKOORDINASI UNTUK MENYELEMATKAN JIWA DAN PEREKONOMIAN

BIAYA PENANGANAN COVID-19 → Rp695.2 trillion

PROGRAM KESEHATAN

Total Anggaran Rp87,55 T

1. Belanja Penanganan Covid-19 Rp65,80T
2. Insentif Tenaga Medis Rp5,90T
3. Santunan Kematian Rp0,30T
4. Bantuan Iuran JKN Rp3,00T
5. Gugus Tugas Covid-19 Rp3,50T
6. Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Total Anggaran Rp607,65 T

Perlindungan Sosial Rp203,90T

1. PKH Rp37,40T
2. Sembako Rp43,60T
3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T
4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T
5. Pra Kerja Rp20,00T
6. Diskon Listrik Rp6,90T
7. Logistik / Pangan / Sembako Rp25,00T
8. BLT Dana Desa Rp31,80T

Sektoral K/L & Pemda Rp106,11 T

1. Program Padat Karya K/L Rp18,44T
2. Insentif Perumahan Rp1,30T
3. Pariwisata Rp3,80T
4. DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T
5. Cadangan DAK Fisik Rp8,70
6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T
7. Cadangan Perluasan Rp58,87T

UMKM Rp123,46 T

1. Subsidi bunga Rp35,28T
2. Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T;
3. Belanja IJP Rp5,00T
4. Penjaminan untuk Modal Kerja (*Stop Loss*) Rp1,00T;
5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T
6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T

Pembiayaan Korporasi Rp53,57 T

1. Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya Rp3,42T
2. PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)
3. Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja Rp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)

Insentif Usaha Rp120,61T

1. PPh 21 DTP Rp39,66T
2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T
3. Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T
4. Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T
5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T
6. Stimulus Lainnya Rp26,00T

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya

PRINSIP

- Asas keadilan sosial
- Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Mendukung Pelaku Usaha
- Menerapkan kaidah kebijakan: kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel
- Tidak menimbulkan moral hazard
- Pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing

PEN DILAKUKAN MELALUI

- Penyertaan Modal Negara (PMN)
- Penempatan Dana
- Investasi Pemerintah
- Penjaminan
- Belanja Negara

PELEBARAN DEFISIT APBN

mencerminkan dampak Covid-19 terhadap pendapatan negara & kebutuhan pendanaan untuk mengakomodasi penanganan Covid-19

	APBN 2020 (Rp Triliun)	Original	1st Change (Perpres 54/2020)	2nd Change (Perpres 72/2020)
A.	**PENDAPATAN NEGARA**	**2.233,2**	**1.760,9**	**1.699,9**
1.	Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,6	1.404,5
2.	PNBP	367,0	297,8	294,1
B.	**BELANJA NEGARA**	**2.540,4**	**2.613,8**	**2.739,2**
I.	Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,1	1.975,2
II.	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,9	762,7	763,9
C.	**SURPLUS/(DEFISIT)**	**(307,2)**	**(852,9)**	**(1.039,2)**
	% Surplus/(Defisit) terhadap PDB	*(1,76)*	*(5,07)*	*(6,34)*
D.	**PEMBIAYAAN**	**307,2**	**852,9**	**1.039,2**

Penurunan pendapatan negara akibat penurunan aktivitas ekonomi dan penyediaan insentif untuk mendukung bidang kesehatan dan dunia usaha

Peningkatan belanja terutama untuk program kesehatan, *social safety net*, dan pemulihan ekonomi

Defisit diperbolehkan meningkat di atas 3% terhadap PDB hingga 2022

Strategi pembiayaan yang pruden untuk menutup kebutuhan defisit dan mendukung program PEN

REALISASI APBN SEMESTER I TAHUN 2020

Pendapatan menurun akibat perlambatan ekonomi, kinerja belanja tetap dapat tumbuh positif untuk mendukung penanganan dampak Covid-19

Uraian (triliun rupiah)	2019			2020				
	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Semester I	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
Pendapatan Negara	**899,6**	**41,5**	**7,9**	**2.233,2**	**1.699,9**	**811,2**	**47,7**	**(9,8)**
1. Penerimaan Perpajakan	**689,9**	**38,6**	**5,6**	**1.865,7**	**1.404,5**	**624,9**	**44,5**	**(9,4)**
a. Penerimaan Pajak	604,3	38,3	3,9	1.642,6	1.198,8	531,7	44,4	(12,0)
b. Kepabeanan dan Cukai	85,6	41,0	19,0	223,1	205,7	93,2	45,3	8,8
2. PNBP	**209,1**	**55,3**	**18,3**	**367,0**	**294,1**	**184,5**	**62,7**	**(11,8)**
a. PNBP SDA	70,7	37,1	(5,8)	160,4	79,1	54,5	68,9	(22,9)
b. PNBP Non SDA	138,4	73,8	36,0	206,6	215,1	130,0	60,5	(6,1)
3. Penerimaan Hibah	**0,5**	**120,6**	**(83,2)**	**0,5**	**1,3**	**1,7**	**133,8**	**231,4**
Belanja Negara	**1.034,7**	**42,0**	**9,6**	**2.540,4**	**2.739,2**	**1.068,9**	**39,0**	**3,3**
1. Belanja Pemerintah Pusat	**630,8**	**38,6**	**13,0**	**1.683,5**	**1.975,2**	**668,5**	**33,8**	**6,0**
a. Belanja K/L	342,4	40,0	15,7	909,6	836,4	350,4	41,9	2,4
b. Belanja Non K/L	288,4	37,0	9,9	773,9	1.138,9	318,1	27,9	10,3
2. TKDD	**403,9**	**48,9**	**4,8**	**856,9**	**763,9**	**400,4**	**52,4**	**(0,9)**
Defisit	**(135,1)**	**45,7**	**22,2**	**(307,2)**	**(1.039,2)**	**(257,8)**	**24,8**	**90,7**
% Defisit thd PDB	***(0,85)***			***(1,76)***	***(6,34)***	***(1,57)***		
Pembiayaan Anggaran	**176,3**	**59,6**	**0,1**	**307,2**	**1.039,2**	**416,2**	**40,0**	**136,0**
SiLPA/SiKPA	**41,2**			**-**	**-**	**158,4**	**-**	

REALISASI PENANGANAN COVID-19 DAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PELAKSANAAN DI LEVEL OPERASIONAL & PROSES ADMINISTRASI MASIH MENJADI TANTANGAN

KESEHATAN

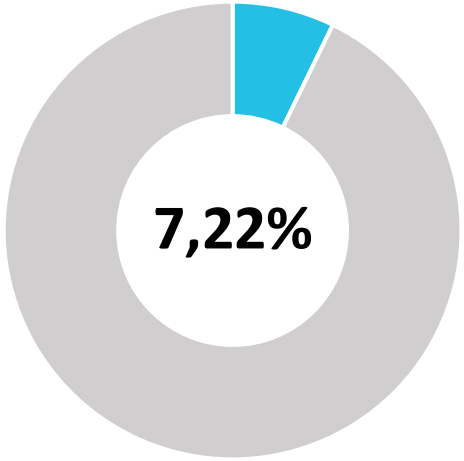

PERLINDUNGAN SOSIAL

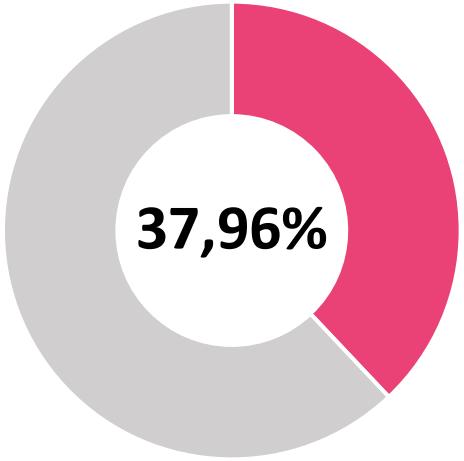

SEKTORAL DAN PEMDA

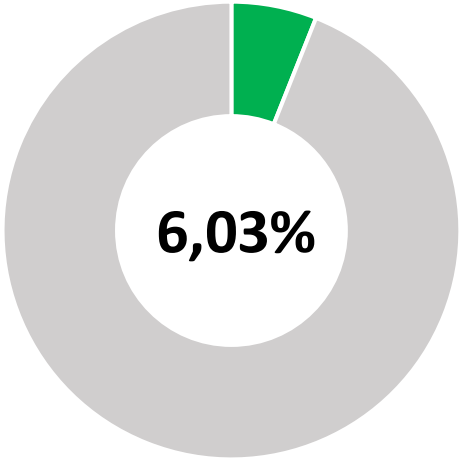

UMKM

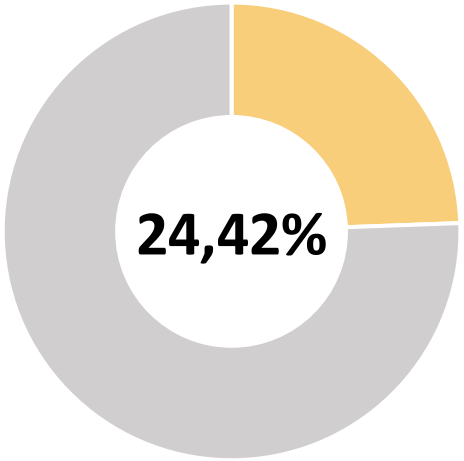

PEMBIAYAAN KORPORASI

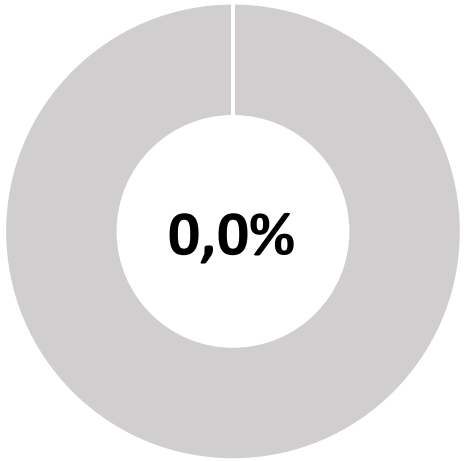

INSENTIF USAHA

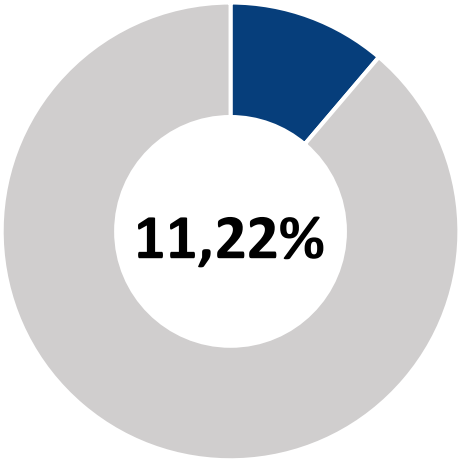

Beberapa perbaikan untuk percepatan realisasi yang perlu dilakukan:

- Mempercepat penyelesaian regulasi dan penyederhanaan administrasi
- Mempercepat implementasi program untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha
- Memperkuat komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran publik, pemanfaatan stimulus, serta mendapatkan feedback.

Data hingga 17 Juli 2020

MENJAGA *GOOD GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEN

Sinergi dengan para pengambil kebijakan

Komunikasi dan koordinasi dalam rangka monitoring implementasi Program PEN, termasuk dengan BPK dan KPK.

Penerbitan dasar hukum Program PEN dan Revisi APBN

PEN dan perubahan APBN diatur melalui penerbitan:

- PERPPU 1/2020 → UU NO.2/2020
- PP 23/2020
- Perpres 54/2020 → Perpres 72/2020

Monitoring melalui Gugus Tugas Khusus

Monitoring secara sistematis dan berkala untuk mempercepat implementasi program PEN, termasuk mengatasi hambatan implementasi.

Terdiri dari Gugus Tugas insentif fiskal, belanja, dan pembiayaan.

Proses diskusi dan konsultasi dengan DPR

Topik diskusi juga mencakup kebutuhan anggaran dan kebijakan program PEN.

BURDEN SHARING PEMBIAYAAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (1)

Dalam kondisi *extraordinary* pandemi Covid-19, **Pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI)** untuk mendukung pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bentuk sinergi tersebut dilakukan dengan **mekanisme *burden sharing***.

Pembiayaan public goods Rp397,56 triliun

- ✓ Terdiri atas kesehatan Rp87,55 T, perlindungan sosial Rp203,9 T, serta sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp106,11 T.
- ✓ Akan **ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN dengan mekanisme *private placement*,** dengan kupon berdasarkan BI reverse repo rate. Sesuai tanggal jatuh tempo SBN, Pemerintah membayar bunga/imbalan kepada BI.
- ✓ Pada hari yang sama BI akan mengembalikan bunga/imbalan kepada Pemerintah sebagai kontribusi BI sesuai skema *burden sharing*. Pengembalian bunga/imbalan oleh BI berlaku sampai dengan SBN yang diterbitkan jatuh tempo.

Pembiayaan non-public goods Rp177,03 triliun

- ✓ Terdiri atas dukungan UMKM Rp123,46 triliun dan dukungan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun
- ✓ **Akan ditanggung Pemerintah melalui penjualan SBN kepada market. BI berkontribusi sebesar selisih antara *market rate* dengan BI reverse repo rate 3 bulan dikurangi 1%.**

Belanja non-public goods lainnya Rp328,87 triliun

- ✓ **Ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah melalui penjualan SBN dengan kupon berdasarkan *market rate*.**

Total pembiayaan non-public goods Rp505,90 triliun

- ✓ **Yang lebih terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha dilakukan melalui mekanisme market, dimana BI akan tetap bertindak sebagai last resort** sesuai SKB tanggal 16 April 2020

BURDEN SHARING PEMBIAYAAN PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (2)

- ***Burden sharing*** **diterapkan dengan menjaga integritas pasar,** dimana jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, *tradable,* dan *marketable*, dengan memperhatikan profil jatuh tempo utang. **Pembelian SBN oleh BI akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN** dan kebutuhan riil program PEN.

- ***Burden sharing*** **dilakukan dengan penerapan kaidah-kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, dengan tata kelola yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan,** serta beberapa prinsip penting yang akan terus dijaga dan selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI (SKB II) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Deputi Gubernur BI, yaitu dari sisi:
  - **Fiskal:** Menjaga *fiscal space* dan *fiscal sustainability* dalam jangka menengah, serta menjaga kualitas defisit APBN yang ditujukan untuk belanja yang produktif dan defisit ini akan diturunkan secara bertahap menjadi di bawah 3% mulai tahun 2023, khusus dijalankan selama pandemi Covid-19 dan pemulihannya;
  - **Moneter:** Menjaga stabilitas nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi agar tetap terkendali;
  - **Makro:** Memperhatikan kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*.

  Selain itu Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko bilamana terjadi dampak perburukan (*downside risk*) dari penerapan skema ini.

- Pengaturan ***burden sharing*** **ini hanya untuk pembiayaan APBN tahun 2020.** Sedangkan untuk pembiayaan tahun-tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN tahun bersangkutan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN: JANGKA MENENGAH DAN 2021

INDONESIA TELAH MEMASUKI KATEGORI UPPER MIDDLE INCOME CLASS DI TAHUN 2019

Namun tantangan jangka panjang masih tetap menjadi perhatian

Pertumbuhan ekonomi harus terus diakselerasi untuk menghindari *Middle Income Trap* (MIT) dan menjadi negara maju.

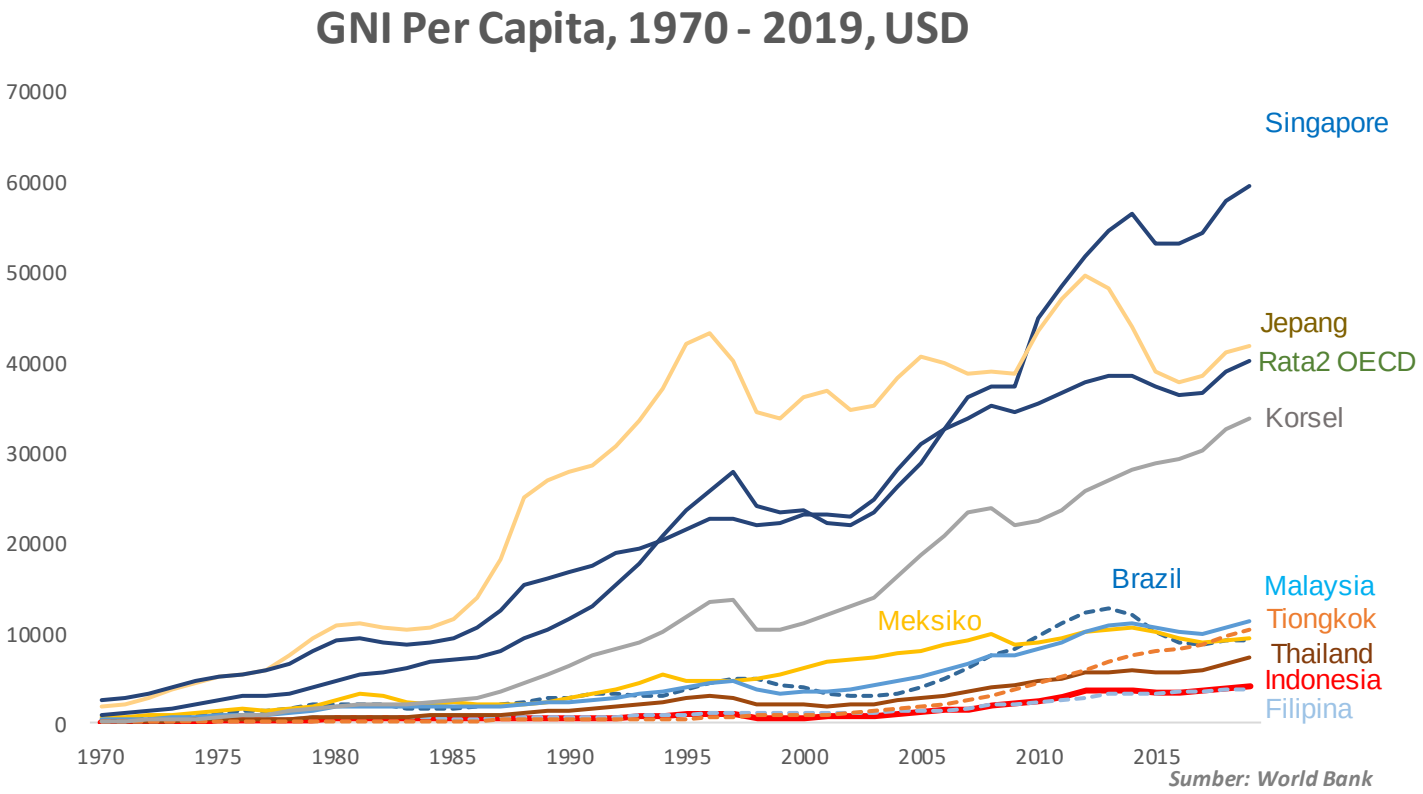

Negara	*Lower Middle* [Growth]	*Upper Middle* [Growth]	Keterangan
Brazil (2019: USD9,130)	1975–1995 [3,2 %]	1996 – … [2,3 %]	▪ 21 tahun LM ▪ 24 tahun UM
Mexico (2019: USD9,430)	1974–1992 [3,9 %]	1993 – … [2,4 %]	▪ 19 tahun LM ▪ 27 tahun UM
Malaysia (2019: USD11,200)	1978–2002 [6,5 %]	2003 – … [5,1 %]	▪ 25 tahun LM ▪ 17 tahun UM
Indonesia (2019: USD4,050)	2004 – 2018 [5,5 %]	2019 - …. [5,0 %]	▪ 15 tahun LM ▪ 1 tahun UM
Filipina (2019: USD3,850)	1996 – … [5,1 %]	–	▪ 24 tahun LM
Thailand (2019: USD7,260)	1988 – 2008 [5,8 %]	2009 – …. [3,2 %]	▪ 21 tahun LM ▪ 11 tahun UM
Tiongkok (2019: USD10,410)	2002 - 2009 [10,8 %]	2010 – …. [7,7 %]	▪ 8 tahun LM ▪ 10 tahun UM
Singapura (2019: USD59,590)	1971 - 1979 [8,7 %]	1980 – 1990 [8,0 %]	▪ 9 tahun LM ▪ 11 tahun UM ▪ 29 tahun AE
Jepang (2019: USD41,690)	1966 - 1973 [8,6 %]	1974 – 1985 [3,7 %]	▪ 8 tahun LM ▪ 12 tahun UM ▪ 34 tahun AE
Korea Selatan (2019: USD33,720)	1978 - 1987 [8,9 %]	1988 – 1995 [9,0 %]	▪ 10 tahun LM ▪ 8 tahun UM ▪ 24 tahun AE

Sumber: World Bank, diolah

- Pada 1 Juli 2020, World Bank mengumumkan kenaikan status Indonesia menjadi negara Upper Middle Income Class, menggunakan data GNI Per Kapita 2019. (sumber: https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021?cid=SHR_BlogSiteShare_EN_EXT)
- Singapura, Jepang dan Korea Selatan berhasil menjadi negara maju, setelah berada dalam kelas menengah antara 15-20 tahun. Sementara Brazil, Malaysia, Meksiko, Thailand dan Indonesia masih terperangkap di *Middle Income Countries.*

UPAYA KELUAR DARI *MIDDLE INCOME TRAP* (MIT) DENGAN MENYELESAIKAN MASALAH FUNDAMENTAL

Dengan perbaikan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas SDM – Tenaga Kerja

PENYEBAB SUATU NEGARA MASUK *MIDDLE INCOME TRAP*

- Demografi tidak suportif
- Pasar Tenaga Kerja tidak efisien
- Infrastruktur tidak memadai
- Institusi lemah
- Pasar keuangan tidak efisien
- Diversifikasi produk yang rendah
- Rendahnya Inovasi

Sumber: Kamil, P. dan Jakub, Z., ADB Institute, Juli 2017

5 ARAHAN STRATEGIS PRESIDEN

Pembangunan SDM

Pembangunan Infrastruktur

Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan Regulasi

Transformasi Ekonomi

MASALAH FUNDAMENTAL INDONESIA

PRODUKTIVITAS PERLU DIPERBAIKI

- Gap infrastruktur
- Kualitas SDM
- Tingkat adopsi teknologi rendah

DAYA SAING PERLU DITINGKATKAN

- Iklim usaha kurang kondusif untuk investasi
- Birokrasi dan regulasi belum efisien
- *High cost economy* hambat daya saing ekspor

KUALITAS SDM – TENAGA KERJA

- Usia produktif masih dominan tetapi produktivitas rendah dan masih banyak yang menganggur
- Kelas menengah masih rentan dan banyak di sektor informal
- Perlu lapangan usaha yang lebih banyak dan berkualitas untuk pemerataan kesempatan kerja

ISU-ISU STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN 2021

Perlu terobosan kebijakan untuk akselerasi pemulihan sosial-ekonomi

Mempersiapkan new normal

1. Optimalisasi teknologi informasi melalui **digitalisasi layanan publik** (Pendidikan, Kesehatan, perijinan);
2. Dukungan **dunia usaha yang berbasis digital ekonomi;**
3. **Efisiensi birokrasi** dengan mendorong berbasis ICT *(E-government, E-budgeting, WFH, FWS);* dan
4. **Gaya hidup sehat.**

Akselerasi pemulihan sosial dan kesehatan

1. Dukungan penguatan bidang kesehatan untuk pemulihan dan mempersiapkan ***health security preparedness***
2. **Melanjutkan jaring pengaman sosial** (Kartu sembako,PKH dan Kartu Pra kerja) untuk akselerasi pemulihan;
3. Menyiapkan **Program perlindungan sosial yang *adaptative*** terhadap resesi dan bencana;

Akselerasi pemulihan ekonomi

1. **Melanjutkan PEN** untuk mendukung sektor yang mempunyai daya ungkit;
2. **Fokus sektoral:** pertanian, energi, perdagangan, makanan dan kontruksi; dan
3. **Mendukung industri kreatif dan UMKM serta Pariwisata**

Inovasi Kebijakan

1. **Insentif fiskal (*conditional fiscal incentive*)**, yang mensyaratkan tidak terjadi PHK, padat karya, hidup sehat;
2. Sistem perpajakan yang **semakin *compatible* dengan *digital economy*** dengan menyiapkan ***core tax system*** yang semakin besar diharapkan dapat menjadi basis pajak lebih besar dan basis pengambilan kebijakan semakin kuat;
3. ***Reformasi penganggaran - zero based budgeting*** (efisien, fokus prioritas);
4. ***Automatic stabilizer*** untuk meredam *uncertainty*

AKSELERASI *RECOVERY* DAN PENGUATAN REFORMASI

Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Momentum Reformasi Untuk Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju

1 REFORMASI KESEHATAN

- Penguatan **Faskes, Alkes dan Nakes**;
- Efektifitas **Program JKN;**
- Penyiapan ***health security preparedness;*** dan
- Penguatan **sistem Kesehatan yang terintegrasi (Pusat dan daerah)**

2 REFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

- Melanjutkan ***social safety net* untuk *recovery (PKH, Sembako, Pra Kerja)***;
- Efektifitas program (**integrasi/sinergi antar program)**; dan
- ***Mempersipakan Social safety net yang adaptative*** terhadap bencana / resesi ekonomi (***automatic stabilizer***).

3 REFORMASI PENDIDIKAN

- Digitalisasi infrastruktur pendidikan;
- Penguatan **kompetensi guru**;
- **Simplifikasi kurikulum dan penguatan karakter**;
- Pengukuran berbasis **standar global;**
- ***Link and match*** dan penguatan PAUD; dan
- Koordinasi **pusat dan daerah, masyarakat.**

4 DUKUNGAN INDUSTRI

- **Insentif fiskal** untuk pemulihan dunia usaha;
- **Omnibus law CIKA dan perpajakan** untuk dorong investasi dan kesempatan kerja; dan
- Dukungan **transformasi ekonomi.**

5 REFORMASI TKDD

- Penguatan *quality control* terhadap TKDD;
- Mendorong TKDD berbasis hasil *(result based);*
- TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan (Kesehatan, *social safety net,* Pendidikan); dan
- Mendorong *integrated funding.*

6 REFORMASI PERPAJAKAN

- Pemberian **insentif fiskal untuk pemulihan** (sektor yang mempunyai daya ungkit);
- **Relaksasi prosedur** untuk mempercepat pemulihan ekonomi;
- **Perluasan basis pajak** (peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan, serta pelaksanaan 5 (lima) pilar reformasi, yi: organisasi, SDM, IT dan basis data, serta proses bisnis dan regulasi;
- Pemberian **insentif untuk vokasi dan litbang**, serta perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; dan
- **Ekstensifikasi barang kena cukai**.

7 REFORMASI PENGANGGARAN

- Efisiensi kebutuhan dasar→**efisiensi** belanja birokrasi;
- Fokus terhadap program prioritas ***(Zero based budgeting)***;
- Berorientasi pada hasil ***(result based)***; dan
- Menyiapkan startegi untuk antisipasi ketidakpastian yang lebih solid ***(automatic stabilizer).***

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH